

**PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor)**

**Indrie Avisha 1), Budiman Slamet 2), Sujatmiko Wibowo3)**

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email korespondensi: <sup>2</sup> [avishaindrie173@gmail.com](mailto:avishaindrie173@gmail.com)

**ABSTRAK**

Agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan suatu penyajian informasi keuangan yang utuh dalam laporan keuangan. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam penyajian laporan keuangan, pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan secara relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan ungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor. Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan sumber data primer. Populasi dalam penelitian ini pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor. Teknik penentuan sampel yang digunakan yaitu non probability sampling. Sampel penelitian ini sejumlah 70 pegawai pada bagian bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang aset, bidang akuntansi dan yang berkaitan dengan masalah keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan survei yang diperoleh dengan cara pembagian kuesioner kepada para responden. Metode analisis yang digunakan adalah Uji Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data dengan Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik dengan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas, Analisis Regresi Linear Berganda, Pengujian Hipotesis dengan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Uji Parsial (Uji  $t$ ), dan Signifikan Simultan (Uji  $F$ ) menggunakan program IBM SPSS Statistics 25. Hasil uji hipotesa secara parsial menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan daerah Kabupaten Bogor dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor. Hasil uji hipotesa secara simultan yaitu penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor. Nilai koefisien determinasi sebesar 69,1% akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan, sedangkan sisanya 30,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata Kunci : Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.**

**ABSTRACT**

*In order to guarantee public accountability, a complete presentation of financial information is required in financial reports. To realize this in the presentation of financial statements, the government must be able to present financial reports in a relevant, reliable, understandable and comparable manner. In addition, these financial reports also need to be equipped with adequate disclosures regarding information that can influence decisions. This study aims to examine the effect of presentation of regional financial reports on accountability of regional financial management, the effect of accessibility of regional financial reports on accountability of regional financial management and the*

*effect of presentation and accessibility of regional financial reports on accountability of regional financial management at BPKAD Bogor Regency.*

*This type of research is a quantitative method using primary data sources. The population in this study were employees of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Bogor Regency. The sampling technique used is non-probability sampling. The sample of this study was 70 employees in the budget sector, treasury sector, assets sector, accounting sector and those related to financial matters at the Regional Asset Financial Management Agency (BPKAD) Bogor Regency. Data collection was carried out through direct observation and surveys obtained by distributing questionnaires to the respondents. The analytical method used is Descriptive Statistical Test, Data Quality Test with Validity Test, Reliability Test, Classical Assumption Test with Normality Test, Multicollinearity Test, and Heteroscedasticity Test, Multiple Linear Regression Analysis, Hypothesis Testing with Determination Coefficient Test (R<sup>2</sup>), Partial Test (t test), and Simultaneous Significance (F test) using the IBM SPSS Statistics 25 program.*

*The results of the partial hypothesis test show that the presentation of financial statements has a positive and significant effect on regional management accountability of Bogor Regency and the accessibility of financial reports has a positive and significant effect on regional financial management accountability of Bogor Regency. The results of the simultaneous hypothesis test, namely the presentation of financial reports and the accessibility of financial reports simultaneously influence the accountability of regional financial management in Bogor Regency. The coefficient of determination of 69.1% accountability for regional financial management in Bogor Regency is influenced by the presentation of financial reports and the accessibility of financial reports, while the remaining 30.9% is influenced by other variables not examined in this study.*

**Keywords: Presentation of Regional Financial Reports, Accessibility of Regional Financial Reports, and Accountability of Regional Financial Management.**

## **PENDAHULUAN**

Di era reformasi yang terjadi di Indonesia saat ini, masyarakat menuntut agar pemerintahan mampu mengelola otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik. Oleh karena itu daerah juga diberi kebebasan dalam hal penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya. . Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Sehingga untuk menguraikan secara komprehensif penyebab dari dihasilkannya suatu opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD.

Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalain dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit unit kerja didalamnya satuan kerja perangkat daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah juga merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal yaitu tanggungjawab kepala daerah kepada masyarakat, investor, lembaga, pers serta pihak pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan ekonomi sosial dan politik.

Aksesibilitas laporan keuangan juga memiliki keterkaitan di dalamnya, akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. (Miftahul Reza Fauziyah dan Nur Handayani, 2017)

Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah publikasi laporan keuangan oleh pemerintah nampaknya belum menjadi hal yang umum. Peran laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan mudah dijangkau oleh para pengguna potensial

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maka Badan Pengawasan Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap Pemerintah Daerah (Pemda). Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor selama tahun 2010-2020 mendapatkan opini yang berbeda dari BPK. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mendapatkan predikat WDP sebanyak lima kali dan mendapatkan predikat WTP sebanyak enam kali. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan penilaian tertinggi atas laporan keuangan daerah dengan menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Wajar yang dimaksud adalah bahwa laporan keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Adapun opini WTP yang dikeluarkan BPK ternyata tidak menjamin suatu daerah bebas dari korupsi. Jika melihat realitas yang terjadi, penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Bogor dikatakan belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Masih banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah seperti pada tahun 2017 adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) Rp14,3 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2017 yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor (<https://bogor.pojoksatu.id> diakses 10 Juni 2022). Kemudian pada tahun 2017-2018 adanya dugaan korupsi dana bantuan bencana yang dilakukan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD, berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan dan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Bogor sebesar Rp1,7 miliar. (<https://metro.tempo.co/> diakses pada 3 Januari 2023). Dan juga pada 2019 Mantan Kepala Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor itu menilap uang dari enam kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana desa dan bantuan keuangan (bankeu) provinsi. Dana yang dikorupsi tersebut seharusnya dibayarkan untuk betonisasi jalan desa, bantuan rumah tidak layak huni, hingga bantuan untuk badan usaha milik desa, "Total anggarannya ini Rp3,4 miliar, kemudian setelah diaudit oleh inspektorat, ada kerugian Rp900 juta," kata Kepala Kejari Kabupaten Bogor. (<https://megapolitan.antaranews.com> diakses 3 Januari 2023). Adapun pada tahun 2020 terjadi dugaan korupsi suap pengurusan izin rumah sakit senilai 120 juta disita di Kecamatan Cibungbulang, dan vila di Kawasan Puncak Kecamatan Cisarua yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor (<https://www.jurnaljabar.id> diakses 10 Juni 2022).

Kasus korupsi tersebut, berdasarkan sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan terkait penyalahgunaan jabatan masih terdapat kelemahan. Penyajian laporan keuangan yang kurang baik akan mendorong penurunan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan semakin tingginya tingkat aksesibilitas laporan keuangan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## **KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS<sup>1</sup>**

### **Penyajian Laporan Keuangan Daerah**

Sebagai media akuntabilitas publik, laporan keuangan pemerintah daerah berguna untuk mempertanggungjawabkan penggunaan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan publik kepada pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan BPKAD yang ada dalam pemerintahan daerah. Sesuai dengan Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 Paragraf 24 laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Terdapat beberapa kriteria kualitas informasi spesifik keputusan, diantaranya adalah (Suwardjono 2014, 164–177) :

1. Relevan

Kemampuan informasi dalam membentuk pemakai untuk mencapai tujuannya, untuk dipahami maknanya, dan tepat waktu dalam ketersediaannya untuk fasilitas proses pengambilan keputusan atau kebijakan.

2. Andal

Kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan dan keterujian bahwa informasi tersebut benar atau valid, termasuk ketetapan penyimbolan (kecocokan pengukur dan fenomena yang di ukur)

3. Dapat dibandingkan

Kemampuan informasi untuk membantu para pemakai dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara perangkat fenomena ekonomi.

4. Dapat dipahami

Ketidakhakikan dan tidak bertindak sesuai keinginan pihak tertentu atau menguntungkan/merugikan pihak tertentu atau menghindari akibat konsekuensi.

### **Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah**

Menurut Mardiasmo (2002), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan

---

<sup>1</sup> Untuk penelitian kualitatif, cukup "Kajian Literatur".

organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability* dan *stewardship*). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (*internet*); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004).

### **Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah**

Yusriwanti (2021) menjelaskan bahwa menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara nasional diperlukan dalam penyediaan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas serta dasar bagi para pejabat pembuat kebijakan fiskal dalam membuat keputusan. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh hasil pembangunan.

SIKD sebagai sebuah sistem juga pemerintah daerah harus memenuhi:

1. Keterbukaan, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.
2. Kemudahan, yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada stakeholder dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.

*Accesible*, yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*).

### **Definisi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Mardiasmo (2016:20) menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Ulum (2010:40) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

### **Indikator Akuntabilitas**

Menurut Mudjiyono (2018) dimensi akuntabilitas sektor publik dibagi menjadi empat poin penting, antara lain:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)  
Akuntabilitas kejujuran merupakan perilaku untuk menghindari suatu tindakan penyimpangan kekuasaan. Sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan ketaatan pada hukum dan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan.
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)  
Akuntabilitas proses merupakan prosedur administrasi, sistem informasi akuntansi dan manajemen sudah diterapkan dengan baik untuk melaksanakan tugas mengelola keuangan.
3. Akuntabilitas program (*program accountability*)  
Akuntabilitas program merupakan suatu pertimbangan tujuan dan program yang telah dilaksanakan sudah efektif dan efisien dimana hasil yang diperoleh sudah maksimal dengan meminimalisir biaya yang dikeluarkan.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan semua kebijakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada DPR dan masyarakat.

**Kerangka Pemikiran**

**Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 diantaranya: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah berupa laporan keuangan daerah kepada pengguna laporan pemerintah. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpangan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Ahmad Hasan (2017) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan daerah. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Yusriwati (2021) yaitu bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Apabila proses penyajian laporan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan maka semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah yang baik dan benar serta memenuhi karakteristik laporan keuangan, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah serta sangat diharapkan dapat mengurangi kelalaian dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

**Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apalah artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Dalam penelitiannya Nur Ahmad Hasan (2017) variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah. Hasil tersebut didukung

oleh penelitian Yusriwati (2021) bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Jadi dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka akan memungkinkan berjalannya fungsi kontrol yang baik terhadap pertanggungjawaban penggunaan aset daerah maupun kontrol terhadap kebijakan- kebijakan keuangan yang diambil pemerintah, baik kontrol yang dilakukan badan pemeriksa, masyarakat maupun investor. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 24 kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006).

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertical. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Tuntutan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap pelaporan keuangan pemerintah daerah harus terdapat Penyajian Laporan Keuangan Daerah hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Berarti dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Ahmad Hasan (2017) variabel penyajian laporan keuangan Daerah dan aksesibilitas laporan keuangan Daerah menunjukkan bahwa secara bersama-sama memiliki pengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian Yusriwati (2021) penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Hipotesis Penelitian**

- H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- H3: Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah verifikatif dengan metode penelitian *explanatory survey*. Jenis penelitian ini untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga memperoleh hasil yang dapat memperkuat hasil baru dari teori dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan metode *explanatory survey* adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena atau kesenjangan dalam bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menjelaskan tentang "Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor".

### **Objek Penelitian, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

#### **Objek Penelitian**

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas sebagai variabel independen sedangkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan sebagai variabel dependen.

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fungsi komponen yang diteliti. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari: individu maupun kelompok tertentu dalam suatu organisasi/perusahaan/instansi.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh data primer, lokasi dalam penelitian ini adalah yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

#### **Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Dalam penelitian ini data primer berupa persepsi para responden atas berbagai pernyataan dalam kuesioner mengenai variabel yang terkait yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Bogor, oleh karena itu harus dilakukan suatu pengumpulan pendapat dari para responden dengan data yang valid. Pengumpulan data tersebut merupakan jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden dalam hal ini untuk diisi oleh pegawai yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada instansi Kabupaten Bogor dengan menggunakan Skala Ordinal.

#### **Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi dibutuhkan untuk mengoperasikan variabel, sehingga menjadikan acuan dalam penggunaan instrumen penelitian untuk pengolahan data selanjutnya. Untuk mempermudah dalam proses analisis, maka peneliti terlebih dahulu mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian. Dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok variabel yang digunakan peneliti meliputi:

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)



Menurut Sugiyono (2017), Variabel Bebas (*Independen Variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Dependen Variabel). Maka dalam penelitian ini ada tiga variabel bebas yaitu Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas.

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Menurut Sugiyono (2017), Variabel Terikat (*Dependen Variable*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mengukur variabel bebas dan variabel terikat adalah dengan menggunakan Skala Likert yang ada pada kuesioner. Menurut (Sugiyono, 2016), Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Skala pengukuran kuisisioner menggunakan skala:

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 3 = Netral (N)

Skor 4 = Setuju (S)

Skor 5 = Sangat Setuju (SS)

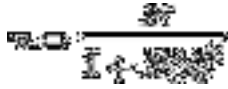
### Metode Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012 hal 116). Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan, Staf Bagian Keuangan, Bendahara pada masing-masing BPKAD Kabupaten Bogor yang terkait dalam penelitian ini Sampel dapat diambil melalui cara-cara tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Metode yang digunakan dalam penarikan sampel adalah *non probability sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Hanya elemen populasi yang memenuhi kriteria tertentu dari penelitian ini yang bisa dijadikan sampel penelitian. Adapun kriteria sampel yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pegawai yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pegawai yang bekerja pada bagian bidang anggaran, bidang penatausahaan keuangan, bidang aset, bidang akuntansi dan yang berkaitan dengan masalah keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
3. Pegawai dengan masa jabatan minimal 1 tahun atau lebih

Penyampelan atas responden (pengguna laporan keuangan) dilakukan dengan teknik *proporsionate stratified random sampling*; yakni, suatu teknik pemilihan sampel yang apabila populasinya tidak (heterogen), yang terdiri dari beberapa kelompok dengan kategori yang berbeda. Menurut data dari BPKAD Kabupaten Bogor jumlah pegawai sebanyak 84 orang pada tahun 2022. Dalam menentukan jumlah besarnya sampel dari total populasi sebanyak 70 orang, maka digunakan rumus Slovin (Husein, 1999:59)

seperti di bawah ini:



### **Metode Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2016) teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan suatu data penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian yang berisikan daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara metode *survey* yang dimana peneliti memberikan pertanyaan dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuesioner. Kuesioner tersebut didistribusikan oleh peneliti secara langsung kepada responden tanpa melalui perantara. Kuesioner dalam penelitian ini dirancang untuk penelitian kuantitatif.

### **Metode Analisis Data**

#### **Uji Statistik Deskriptif**

Pada metode statistik deskriptif ini di mana proses untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan sampel data yang telah dikumpulkan dalam kondisi sebenarnya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Statistik deskriptif pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi karakteristik variabel penelitian yang utama dan data responden. Analisis deskriptif dalam penelitian ini diolah dengan SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 25, yang merupakan sebuah *software* yang berfungsi untuk menganalisis data dan melakukan perhitungan statistik, baik untuk statistik parametrik dan non- parametrik. Pengujian dilakukan untuk memperoleh hasil dari korelasi dan signifikansi dengan melakukan perhitungan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis yang digunakan untuk membandingkan hasil hubungan antar variabel.

#### **Uji Kualitas Data**

Dalam melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner membutuhkan kesungguhan responden dalam menjawab pernyataan-pernyataan dan faktor situasional merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas kuesioner yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Keabsahan suatu hasil penelitian sangat tergantung pada alat pengukur variabel yang akan diteliti. Alat ukur atau instrumen berupa kuesioner dikatakan memberikan hasil yang akurat dan stabil jika alat ukur itu dapat diandalkan. Jika alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data tidak andal atau tidak dapat dipercaya, maka hasil penelitian yang diperoleh tidak akan valid. Oleh karena itu dalam penelitian ini diperlukan uji validitas dan uji reliabilitas.

#### **Uji Validitas**

Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen bersangkutan yang mampu mengukur apa yang diukur. Uji validitas yang dilakukan bertujuan untuk menguji seluruh item pernyataan yang valid dan yang tidak valid. Pada penelitian ini uji validitas menggunakan korelasi *bivariate* dengan menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 25. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik yang digunakan untuk uji validitas pada penelitian ini yaitu dengan teknik korelasi *Pearson Product Moment*.

Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi *bivariate* dengan melihat output *Pearson Correlation*. Ghozali (2013) pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (uji 2 sisi dengan sig.0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- 2) Jika  $r$  hitung  $<$  tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

#### **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur andal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsisten atau tidaknya responden terhadap kuesioner-kuesioner penelitian. Dalam bukunya, (Sujarweni, 2014) menjelaskan bahwa uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir atau item pernyataan dalam angket (kuesioner) penelitian. Teknik yang digunakan untuk uji reliabilitas pada penelitian ini yaitu dengan teknik Cronbach's Alpha. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai Cronbach's Alpha  $>$  0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten.
- 2) Sementara, jika nilai Cronbach's Alpha  $<$  0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

#### **Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Multikolinearitas**

Menurut (Ghozali, 2016) uji multikolinearitas ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Persamaan model baik adalah yang tidak terdapat korelasi linear atau hubungan yang kuat antar variabel bebasnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), nilai dari *cut off* yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah:

Jika nilai VIF  $>$  10 atau *tolerance*  $<$  0,10 maka terjadi multikolonieritas. Jika nilai VIF  $<$  10 atau *tolerance*  $>$  0,10 maka tidak terjadi multikolonieritas.

##### **Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas berarti varian variabel gangguan yang tidak konstan. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain hasilnya homoskedastisitas dimana variance residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Peneliti melakukan ujiasumsi klasik dengan menggunakan *Scatterplots*. Berikut pedoman yang digunakan untuk memprediksi atau mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas tersebut dilakukan dengan cara melihat pola gambar *scatterplots* dengan ketentuan:

- Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
- Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, dengan jumlah variabel independen lebih dari satu. Regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Formulasi persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

### Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak terkontrol). Dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan.

### Uji Parsial (Uji t)

Menurut (Ghozali, 2016) mengungkapkan uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian yang digunakan adalah hipotesis satu arah dan menggunakan signifikan 5%. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria :

- $H_0$  : Jika  $t_{tabel} < t_{hitung}$  dan nilai signifikan  $\geq 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- $H_a$  : Jika  $t_{tabel} > t_{hitung}$  dan nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

### Uji Goodness of Fit (Uji F)

Menurut (Ghozali, 2016) Uji F disini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas

(independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Prosedur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat bebas  $(n - k)$ , di mana  $n$  adalah jumlah pengamatan dan  $k$  adalah jumlah variabel.
- b. Kriteria keputusan :
  - $H_0$  : Uji Kecocokan model ditolak jika  $\alpha > 0,05$
  - $H_a$  : Uji Kecocokan model diterima jika  $\alpha < 0,05$

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi  $R^2$  pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Pengumpulan Data**

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada kantor BPKAD Kabupaten Bogor yang dilaksanakan sejak 1 Desember 2022 sampai selesai. Menurut data dari BPKAD Kabupaten Bogor jumlah pegawai sebanyak 84 orang pada tahun 2022. Dalam menentukan jumlah besarnya sampel dari total populasi sebanyak 70 orang atau sebanyak 83% dari jumlah pegawai. Maka pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner pada Kantor BPKAD sebanyak 70 eksamplar. Kuesioner tersebut dibagikan kepada pegawai yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel pada penelitian ini antara lain:

1. Pegawai yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
  2. Pegawai yang bekerja pada bagian bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang aset, bidang akuntansi dan yang berkaitan dengan masalah keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
  3. Pegawai dengan masa jabatan minimal 1 tahun atau lebih.
- Jumlah kuesioner yang dikembalikan dan dapat digunakan sebanyak 70 eksamplar, atau tingkat pengembalian data kuesioner sebanyak 100%. Adapun rincian dapat dilihat pada sebagai berikut:

Indrie Avisha: Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas  
Laporan Keuangan Daerah...

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dikirim	70
Kuesioner yang Kembali	70
Kuesioner yang dapat digunakan	70
Kuesioner yang tidak kembali (70-70)	0
Tingkat pengembalian kuesioner (70/70 x 100%)	100%
Tingkat pengembalian yang digunakan (70/70 x 100%)	100%

Berdasarkan tabel diketahui kuesioner-kuesioner yang dibagikan sebanyak 70 kuesioner. Setelah melalui pengecekan tidak ada kuesioner yang tak lengkap pengisiannya sehingga seluruh kuesioner dapat digunakan. Tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100%, dihitung dari persentase jumlah kuesioner yang kembali tanpa memperhitungkan kelayakan responden (70 kuesioner) dibagi total yang dikirim (70 kuesioner). Tingkat pengembalian kuesioner yang dapat digunakan sebesar 100%, dihitung dari persentase jumlah kuesioner dengan memperhitungkan kelayakan responden (70 kuesioner) dibagi dengan total kuesioner yang dikirim (70 kuesioner).

### Pengujian dan Hasil Analisis Data

#### Analisis Deskripsi dan Variabel Penelitian

No. Pertanyaan	Penilaian Responden								Jumlah			
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	Responden	%		
1	0	0	0	0	0	24	34,3%	46	65,7%	70	100	
2	0	0	0	0	0	20	28,6%	50	71,4%	70	100	
3	0	0	0	0	0	30	42,9%	40	57,1%	70	100	
4	0	0	1	1,4%	1	1,4%	25	35,7%	43	61,4%	70	100
5	0	0	0	0	0	28	40,0%	42	60,0%	70	100	
6	0	0	0	0	0	25	35,7%	45	64,3%	70	100	
7	0	0	0	0	0	32	45,7%	38	54,3%	70	100	
8	0	0	0	0	0	30	42,9%	40	57,1%	70	100	
9	0	0	0	0	0	32	45,7%	38	54,3%	70	100	
10	0	0	0	0	0	31	44,3%	39	55,7%	70	100	
Presentase	0	0	1	0,1	1	0,1	27,7	27,7	42,1	42,1	70	100

Dapat dilihat bahwa responden yang memberikan jawaban paling banyak presentasinya adalah pernyataan pertama sebesar 65,7% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara lengkap, pernyataan kedua sebesar 71,4% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa laporan keuangan diselesaikan secara tepat waktu, pernyataan ketiga sebesar 57,1% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa laporan keuangan memungkinkan pengguna mengkoreksi aktivitas keuangan di masa lalu, pernyataan keempat sebesar 61,4% menunjukkan bahwa informasi laporan keuangan membantu pengguna memprediksi kejadian masa kini, pernyataan kelima sebesar 60,0% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa informasi dari laporan keuangan menggambarkan transaksi secara wajar dan jujur, pernyataan keenam sebesar 64,3% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, pernyataan ketujuh, sebesar 54,7% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, pernyataan kedelapan sebesar 57,1% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa laporan keuangan dapat dijadikan tolak ukur dalam anggaran berikutnya,

Indrie Avisha: Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas  
Laporan Keuangan Daerah...

pernyataan kesembilan sebesar 54,3% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan pedoman pada SAP, pernyataan kesepuluh sebesar 55,7% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna.

No. Pertanyaan	Penilaian Responden										Jumlah	
	STS		TS		N		S		SS		Responden	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	1	1,4%	11	15,7%	3	4,3%	33	47,1%	22	31,4%	70	100
2	0	0	9	12,9%	5	7,1%	30	42,9%	26	37,1%	70	100
3	1	1,4%	1	1,4%	7	10,0%	40	57,1%	21	30,0%	70	100
4	1	1,4%	0	0	12	17,1%	31	44,3%	26	37,1%	70	100
5	1	1,4%	0	0	14	20,0%	28	40,0%	17	24,3%	70	100
6	0	0	1	1,4%	8	11,4%	32	45,7%	29	41,4%	70	100
Presentase	4	0,4	22	2,2	49	4,9	204	20,4	141	14,1	70	100

Dapat dilihat bahwa responden yang memberikan jawaban paling banyak persentasenya adalah pernyataan pertama sebesar 47,1% menjawab Setuju (S) menunjukkan bahwa laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa, pernyataan kedua sebesar 42,9% menjawab Setuju (S) menunjukkan bahwa pengguna dapat dengan mudah memperoleh informasi laporan keuangan daerah, pernyataan ketiga sebesar 57,1% menjawab Setuju (S) menunjukkan bahwa pengguna dapat mengakses laporan keuangan melalui internet (*website*), pernyataan keempat sebesar 44,3% menjawab Setuju (S) menunjukkan bahwa laporan keuangan memuat informasi yang wajar terpublikasi, pernyataan kelima sebesar 54,3% menjawab Setuju (S) menunjukkan bahwa laporan keuangan sudah dapat diakses dimanapun dan kapanpun, pernyataan keenam sebesar 45,7% menjawab Setuju (S) menunjukkan bahwa seluruh pengguna laporan keuangan memiliki kemudahan akses yang sama.

No. Pertanyaan	Penilaian Responden										Jumlah	
	STS		TS		N		S		SS		Responden	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	0	0	0	0	6	8,6%	24	34,3%	40	57,1%	70	100
2	0	0	0	0	0	0	28	40,0%	42	60,0%	70	100
3	0	0	0	0	0	0	26	37,1%	44	62,9%	70	100
4	0	0	0	0	0	0	27	38,6%	43	61,4%	70	100
5	0	0	0	0	0	0	41	58,6%	29	41,4%	70	100
6	0	0	0	0	11	15,7%	23	32,9%	36	51,4%	70	100
7	0	0	0	0	0	0	26	37,1%	44	62,9%	70	100
8	0	0	0	0	0	0	25	35,7%	45	64,3%	70	100
9	0	0	0	0	0	0	22	31,4%	48	68,6%	70	100
Presentase	0	0	0	0	17	1,7	242	24,2	371	37,1	70	100

Dapat dilihat bahwa responden yang memberikan jawaban paling banyak persentasenya adalah pernyataan pertama sebesar 57,1% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa laporan keuangan APBD disusun menggunakan pendekatan kinerja, pernyataan kedua sebesar 60,0% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa rancangan APBD yang disampaikan pemerintah kepada DPRD mendapat persetujuan, pernyataan ketiga sebesar 62,9% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa pendapatan daerah diserahkan tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan dan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, pernyataan keempat sebesar 61,4% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, pernyataan kelima sebesar 58,6% menjawab Setuju (S) menunjukkan bahwa tersedianya sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang dicapai pemerintah, pernyataan keenam sebesar 51,4% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa laporan yang dibuat oleh pelaksana kebijakan anggaran di review oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK, pernyataan ketujuh sebesar 62,9% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa laporan keuangan diperiksa oleh BPK untuk dilakukan pemeriksaan, pernyataan kedelapan sebesar 64,3% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa

Indrie Avisha: Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas  
Laporan Keuangan Daerah...

---

laporan keuangan dilakukan finansial audit untuk dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat, pernyataan kesembilan sebesar 68,8% menjawab Sangat Setuju (SS) menunjukkan bahwa indikator hasil kerja yang dirancang untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah.

### Hasil Uji Kualitas Data

#### Hasil Uji Validitas

No.	Pearson Correlation	Rtabel	Batas Sign	Keterangan
1.	0,881	0,235	0,05	Valid
2.	0,843	0,235	0,05	Valid
3.	0,753	0,235	0,05	Valid
4.	0,828	0,235	0,05	Valid
5.	0,777	0,235	0,05	Valid
6.	0,791	0,235	0,05	Valid
7.	0,881	0,235	0,05	Valid
8.	0,878	0,235	0,05	Valid
9.	0,722	0,235	0,05	Valid
10.	0,848	0,235	0,05	Valid

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah dari item\_1 sampai item\_10 tersebut valid/layak digunakan sebagai instrumen penelitian, karena nilai  $r_{hitung}$  lebih besar jika dibandingkan dengan  $r_{tabel}$  *product moment*. Tabel 4.10 menunjukkan hasil uji validitas penyajian laporan keuangan daerah.

No.	Pearson Correlation	Rtabel	Batas Sign	Keterangan
1.	0,820	0,235	0,05	Valid
2.	0,861	0,235	0,05	Valid
3.	0,604	0,235	0,05	Valid
4.	0,753	0,235	0,05	Valid
5.	0,873	0,235	0,05	Valid
6.	0,864	0,235	0,05	Valid

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dari item\_1 sampai item\_6 tersebut valid/layak digunakan sebagai instrumen penelitian, karena nilai  $r_{hitung}$  lebih besar jika dibandingkan dengan  $r_{tabel}$  *product moment*. Tabel 4.11 menunjukkan hasil uji validitas aksesibilitas laporan keuangan daerah.

No.	Pearson Correlation	Rtabel	Batas Sign	Keterangan
1.	0,908	0,235	0,05	Valid
2.	0,849	0,235	0,05	Valid
3.	0,912	0,235	0,05	Valid
4.	0,901	0,235	0,05	Valid
5.	0,883	0,235	0,05	Valid
6.	0,917	0,235	0,05	Valid
7.	0,816	0,235	0,05	Valid
8.	0,801	0,235	0,05	Valid
9.	0,803	0,235	0,05	Valid

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dari item\_1 sampai item\_9 tersebut valid/layak digunakan sebagai instrumen penelitian, karena nilai  $r_{hitung}$  lebih besar jika dibandingkan dengan  $r_{tabel}$  *product moment*. Tabel 4.12 menunjukkan hasil uji validitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

#### Hasil Uji Reliabilitas



## Indrie Avisha: Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah...

No.	Variabel	Cronbach Alpha	rtabel	Keterangan
1.	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	0,945	0,60	Reliabel
2.	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	0,883	0,60	Reliabel
3.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,957	0,60	Reliabel

Dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* atas variabel penyajian laporan keuangan daerah sebesar 0,945, variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah sebesar 0,883, dan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 0,957, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner reliabel dan konsisten karena mempunyai *Cronbach Alpha* > 0,60.

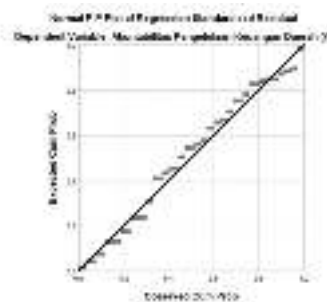
### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.09891135
	Most Extreme Differences	.079
	Absolute	.079
	Positive	.074
	Negative	-.079
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>d</sup>

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.  
d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *kolmogorov smirnov* test untuk *Unstandardized Residual* sebesar 0,079 dengan alpha 5% perbandingan antara *alpha* dengan standar signifikansi yang sudah ditentukan diketahui bahwa nilai *sig* > *alpha* maka artinya distribusi residual normal. Dan disini terbukti jika *Asymp Sig* Sebesar 0,200 lebih besar dari alpha 5% (0,05) sehingga menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian normal.



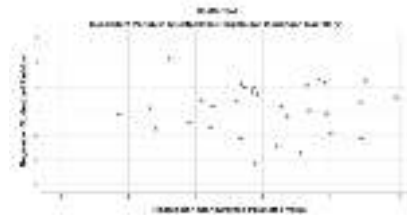
Pada gambar diatas diketahui bahwa data dengan *Normal P-P Plot* pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang digunakan dinyatakan berdistribusi normal atau mendekati normal. Hal tersebut dikarenakan titik-titik pada gambar distribusi terlihat menyebar atau mendekati di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah dengan mengikuti garis diagonal.

### Hasil Uji Multikolinearitas

No.	Variabel	VIF	Tolerance	Keterangan
1.	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	2,149	0,465	Tidak ada masalah <i>Multikolinearitas</i>
2.	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	2,149	0,465	Tidak ada masalah <i>Multikolinearitas</i>

Dari hasil pengujian *multikolinearitas* pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa semua variabel yaitu penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah mempunyai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10. Dengan melihat hasil pengujian *multikolinearitas* di atas, diketahui bahwa tidak ada satupun dari variabel bebas yang mempunyai mempunyai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dari kedua variabel tersebut.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dalam suatu model regresi yang baik, biasanya tidak mengalami *heteroskedastisitas*. Melalui grafik *scatterplot* dapat terlihat suatu model regresi mengalami *heteroskedastisitas* atau tidak. Jika terdapat pola tertentu dalam grafik maka mengindikasikan telah terjadi *heteroskedastisitas*. Dari Gambar 4.2 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada model regresi dalam penelitian ini.

Dalam analisis grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan. Oleh karena itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Uji statistik yang digunakan adalah dengan Uji *Glejser* melalui regresi nilai absolute residual dengan variabel independennya. Nilai *sig* dibandingkan dengan 0.05. hasil statistik dapat dilihat di tabel 4.16 sebagai berikut:

No.	Variabel	Sig	Keterangan
1.	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	0,409	Tidak adanya gejala <i>Heteroskedastisitas</i>
2.	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	0,084	Tidak adanya gejala <i>Heteroskedastisitas</i>

Dapat Dilihat bagwa semua nilai signifikansi variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki nilai *sig* lebih besar dari 0,05, sehingga variabel-variabel independen tersebut dapat dinyatakan tidak terjadi gejala *heteroskedastisitas*.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
	B		Beta		
1 (Constant)	2,969	2,381		1,247	,217
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	,599	,089	,671	6,740	,000
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	,329	,161	,204	2,045	,045

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Berdasarkan table diketahui model regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 2,969 + 0,599X_1 + 0,329X_2 + e$$

Pada persamaan regresi diatas dapat diartikan bahwa nilai konstanta (Y) sebesar 2,969 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka akan terjadi kenaikan akuntabilitas sebesar 2,969. Nilai koefisien (X1) untuk variabel penyajian laporan keuangan memiliki koefisien regresi sebesar 0,599 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan maka akan meningkatkan variabel akuntabilitas sebesar 0,599. Nilai koefisien (X2) untuk variabel aksesibilitas sebesar 0,329 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan maka akan menaikkan variabel akuntabilitas sebesar 0,329.

### Pengujian Hipotesis

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,831 <sup>a</sup>	,691	,682	4,160

a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2), Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)  
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Tabel di atas menunjukkan nilai *R Square* adalah 0,691 atau 69,1%. Maka penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah dapat menjelaskan 69,1% variasi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sisanya 30,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini. Sedangkan, *Adjusted R-square* sebesar 0,682 ini menunjukkan pengaruh variabel Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas sebesar 68,2%.

#### Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
	B	Error	Beta		
1 (Constant)	2,969	2,381		1,247	,217
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	,599	,089	,671	6,740	,000
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	,329	,161	,204	2,045	,045

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.19, hasil uji parsial (uji t), yaitu sebagai berikut:

- a. Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Hasil analisis uji t untuk variabel penyajian laporan keuangan daerah diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $6,740 > t_{tabel} 1,996$  dengan nilai probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_1$  diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

b. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil analisis uji t untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,045 > t_{tabel} 1,996$  dengan nilai probabilitas sebesar  $0,045 < 0,05$  maka  $H_1$  diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

**Hasil Uji Signifikan Simultan (F)**

$$\begin{aligned}
 f_{tabel} &= df1 = k-1 ; df2 = n-k \text{ (k adalah jumlah variabel X + variabel Y)} \\
 &= df1 = 3-1 ; df2 = 70-3 \\
 &= df1 = 2 ; df2 = 67 \\
 f_{tabel} &= 3,13
 \end{aligned}$$

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2594.512	2	1297.256	74.975	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1159.274	67	17.303		
	Total	3753.786	69			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)  
b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2), Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pengujian menunjukkan hasil  $F_{hitung}$  sebesar 74,975 dengan signifikan 0,000 atau kurang dari 0,05. Nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  (pada df 2;67) yaitu  $74,975 > 3,13$  maka model regresi yang digunakan sudah tepat atau fit, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berarti penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama atau serempak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. terbukti dan diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan laporan keuangan daerah dan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

**Pembahasan Hasil Analisis Data**

Dengan dilakukannya pengujian hipotesis dan statistik oleh penulis pada 70 pegawai BPKAD Kabupaten Bogor dengan menggunakan *Software Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 25 tentang pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Berikut hasil hipotesis penelitian:

### **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kode	Hipotesis	Hasil
H <sub>1</sub>	Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Diterima
H <sub>2</sub>	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Diterima
H <sub>3</sub>	Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Diterima

Berdasarkan hasil uji secara parsial maka penyajian laporan keuangan sebagai variabel independen (X<sub>1</sub>) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel dependen (Y). Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6.740 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1.996, yang artinya  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan signifikansi 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka H<sub>1</sub> diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari daerah atas wewenang yang diberikan kepadanya, apabila proses penyajian laporan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan maka semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi kelalaian dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur Ahmad Hasan (2017) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Gowa menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Fahmi (2020) yang berjudul pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten Palopo yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil uji secara parsial maka aksesibilitas sebagai variabel independen (X<sub>2</sub>) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel dependen (Y). Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2.045 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1.996, yang

artinya  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan signifikansi 0.045 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka  $H_2$  diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya semakin baik aksesibilitas laporan keuangan daerah, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah dikatakan baik apabila pemerintah mampu memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Selain menyajikan laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam mengakses laporan keuangan daerah, agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik.

Dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka publik (badan pemeriksa, masyarakat maupun investor) dapat mengontrol pertanggungjawaban penggunaan aset daerah dan kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mirza Masyhur (2017) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Kota Dumai menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Yusriwanti (2021) yang berjudul pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil uji secara simultan maka penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah sebagai variabel independen (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel dependen (Y). Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai  $f_{hitung}$  sebesar 74.975 dan nilai  $f_{tabel}$  sebesar 3.13, yang artinya  $f_{hitung} > f_{tabel}$  dengan signifikansi 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka  $H_3$  diterima.

Hal ini berarti apabila laporan keuangan yang disajikan sesuai dan aksesibilitas laporan keuangan secara lengkap mudah didapat dan diterapkan secara bersama-sama maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik serta terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Adanya laporan keuangan lengkap dan akses laporan keuangan yang baik dibuat pemerintah maka informasi akan laporan keuangan semakin mudah didapat, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik.

Lucy dkk (2013) mengatakan bahwa hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Tuntutan masyarakat yang muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu

penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2002 (pasal 103) dikatakan bahwa Informasi yang termuat dalam sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 101 merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa keuangan Daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah Daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan Daerah kepada masyarakat yang dapat diketahui secara terbuka dan jujur melalui media tertentu.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil pengujian regresi, diketahui bahwa pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah baik secara individu maupun secara bersama-sama atau serempak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurul Quartina (2018) tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintahan Kota Binjai. Nabila Indria (2018) tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Tasikmalaya.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten Bogor. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan pembahasan yang telah peneliti bahas di bab sebelumnya penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian Penyajian Laporan Keuangan Daerah secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan  $H_1$  diterima. Hal ini terbukti dengan nilai uji signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  atau nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $6,740 > 1,996$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan daerah maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik. Penyajian laporan keuangan secara lengkap dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), maka akan tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Hasil penelitian Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan  $H_2$  diterima. Hal ini terbukti dengan nilai uji signifikansi sebesar  $0,045 < 0,05$  atau nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,045 > 1,996$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa semakin mudah akses terhadap laporan keuangan daerah, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik.
3. Hasil penelitian Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan  $H_3$  diterima.. Hal ini terbukti dengan nilai uji signifikansi  $0,000$  serta nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  (pada  $df$  2;67) yaitu  $74,975 > 3,13$ . Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan maka akan berpengaruh terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang tidak disertakan dalam penelitian. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji koefisien sebesar 69,1% variasi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sedangkan sisa dari presentase yang tidak diteliti sebesar 30,9%, yaitu pengawasan keuangan daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah mencakup segala

tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kota Bogor, maka saran yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

- 1) Bagi instansi pemerintah Kabupaten Bogor
  - a. Bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, terus tingkatkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Bogor agar mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai visi misi.
  - b. Bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan disajikannya informasi laporan keuangan dengan baik dan memenuhi karakteristik pelaporan dan standar akuntansi pemerintahan maka akan membantu pengguna khususnya BPKAD sendiri dalam mengkoreksi dan memprediksi kejadian masa kini.
  - c. Bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, bagi laporan keuangan yang dipublikasikan secara media massa terutama internet (*website*) lebih dipermudah agar terciptanya kontrol baik yang dilakukan oleh BPK, masyarakat maupun investor.
  - d. Bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, dikarenakan pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat maka laporan keuangan harus akuntabilitas, dengan demikian pemerintah kabupaten Bogor mengecek kembali (*me-review*) laporan keuangan tersebut sebelum diserahkan kepada BPK. Hal ini menunjukkan bahwa program/kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan efektifitas.
- 2) Bagi Peneliti selanjutnya
  - a. Bagi peneliti berikutnya disarankan menambah variabel lain seperti transparansi karena pemerintah harus memberikan informasi yang akurat bagi publik yang membutuhkan.
  - b. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk meneliti Instansi mencakup SKPD Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor lainnya agar mendapatkan hasil yang berbeda dan responden yang didapatkan akan lebih banyak lagi

### DAFTAR PUSTAKA<sup>2</sup>

- Akbar, B. 2012. Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah. Artikel. *Fordfoundation. Public Interest Research and Advocacy Center*. Hal 1-2.
- Andi. 2012. Opini Audit BPK Sebagai Indikator Akuntabilitas Pemerintah. Tersedia di <http://akuntansi-pemerintah.blogspot.co.id/2012/06/> [diakses pada 12 Juli 2022]
- Antara News Megapolitrans. Tersedia di <https://megapolitan.antaranews.com> [diakses pada 3 Januari 2023]
- BPK Republik Indonesia. 2020. Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat. Tersedia di: <https://jabar.bpk.go.id/lhp-lkpd-3/> [diakses pada 10 Juni 2022]
- BPK Republik Indonesia. Tersedia di <http://www.bpk.go.id/news> [diakses pada 12 Juli 2022]
- Fahmi. 2020. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Palopo. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo.

---

<sup>2</sup> Untuk pedoman penulisan daftar pustaka secara lengkap, silakan dapat dilihat pada *author guidelines*.



- Fauziyah, MR dan Nur Handayani. 2017. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, [online] Volume 6(6). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1236> [diakses pada 20 Juni 2022]
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 1. BP: Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hasan, Nur Ahmad. 2017. Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Indria, Nabila. 2018. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jurnal Jabar. Tersedia di <https://www.jurnaljabar.id> [diakses pada 10 Juni 2022].
- Kompas.id. Tersedia di <https://www.kompas.id/> [diakses pada 10 Juni 2022].
- LAN. 2015. "AKUNTABILITAS" Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta.
- Lucy, dkk. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness Vol. 3*(1), 21-42.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Mahsun, Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Edisi pertama. Andi. Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Masyhur, Mirza. 2017. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai. *JOM Fekon, Vol. 4*(1), 2, 2017.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Metro Tempo.co. Tersedia di <https://metro.tempo.co/> [diakses pada 3 Januari 2023].
- Pojok Bogor. Tersedia di <https://bogor.pojoksatu.id> [diakses pada 10 Juni 2022]
- Quartina, N. 2018. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2002 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Shende Suresh dan Tony Bennet. 2004. *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA.
- Deviyani, Shinta. 2021. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kota Bogor. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sulistoni, G., 2003. *Fiqh korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*. Nusa Tenggara Barat : SOMASI.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perekayasaan Peloporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta.
- Wibowo, Sujatmiko. 2019. Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Pemberian Opini atas Laporan Keuangan Audited (Studi Kasus pada Kementerian di Indonesia). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* Vol. 5(1), 6, 2019 Hal. 41-52.
- Yusriwarti. 2021. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang (JAAIP) Volume 1(2)*, 10, 2021.